



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 4 SERI F NOMOR 401**

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari menanggung beban kerja dan resiko kerja yang berat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, perlu diberikan Tambahan Penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir selaku Koordinator Pengelola Keuangan.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan membuat Laporan Keuangan SKPD.

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah Dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai Dasar Pelaksanaan Anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir menanggung beban kerja di atas beban kerja normal sehari-hari.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir berhak menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir yang dijabarkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Bagi PNS yang ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) berdasarkan Keputusan Bupati Samosir diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan sebesar Tambahan Penghasilan yang diterima oleh Pejabat definitif.

Pasal 3

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir diberikan atas dasar beban kerja di atas beban kerja normal sehari-hari.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan diberikan dengan mempertimbangkan program, kegiatan dan besar anggaran yang dikelola oleh masing-masing SKPD yang disesuaikan berdasarkan jabatan, pangkat dan golongan ruang, yang ditetapkan setiap tahunnya dan dapat berubah sesuai dengan kemampuan keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

5. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
6. Staf Khusus Bupati adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi tugas sebagai Staf Khusus Bupati Samosir.
7. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah penghasilan di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang diterima oleh PNSD/CPNSD yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang dibebani pekerjaan yang dinilai di atas beban kerja normal.
8. Beban kerja adalah besarnya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PNSD/CPNSD ditinjau dari kondisi kerja yang melampaui beban kerja normal.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang bertanggungjawab kepada Bupati Samosir dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan tugas meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP),

menyiapkan/

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

Pertanggungjawaban atas Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dilaporkan setiap bulannya kepada Bupati Samosir melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati Samosir ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

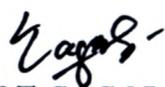
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018. Agar setiap dapat orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 4 SERI F NOMOR 481

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 4 TAHUN 2018****TANGGAL : 29 JANUARI 2018****TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	PERANGKAT DAERAH		JUMLAH PERBULAN
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	17,550,000
		Asisten	11,700,000
		Staf Ahli	5,900,000
		Kabag Setdakab	4,720,000
		Sekretaris KPU	2,360,000
		Staf Khusus Gol. IV	4,720,000
		Staf Khusus Gol. III	2,210,000
		Kepala Seksi/Kasubbag/Kasubbid	2,210,000
		Pelaksana Gol.IV	944,000
		Pelaksana Gol.III	885,000
		Pelaksana Gol.II	708,000
		Pelaksana Gol.I	590,000
		Bendahara Penerimaan	944,000
		Bendahara Pengeluaran	1,770,000
		2	Sekretariat DPRD
Kabag Setwan	2,875,000		
Kepala Seksi/Kasubbag/Kasubbid	1,150,000		
Pelaksana Gol.IV	805,000		
Pelaksana Gol.III	690,000		
Pelaksana Gol.II	575,000		
Pelaksana Gol.I	460,000		
Bendahara Pengeluaran	1,495,000		
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan	10,440,000
		Sekretaris	4,720,000
		Kepala Bidang	4,181,000
		Kepala Seksi/Kasubbag/Kasubbid	2,210,000
		Pelaksana Gol.IV	944,000
		Pelaksana Gol.III	885,000
		Pelaksana Gol.II	708,000
		Pelaksana Gol.I	590,000
		Adminsitrator SIMDA	2,950,000
		Asisten Administrator SIMDA	1,955,000
		Supervisor Gaji	1,888,000
		Operator Gaji	1,416,000
		Operator SIMBADA	1,180,000
		KBUD	4,130,000
		Bendahara Pengeluaran SKPD	1,298,000
		Bendahara Pengeluaran SKPKD	1,534,000
		Bendahara Penerimaan	1,180,000

NO	PERANGKAT DAERAH		JUMLAH PERBULAN
1	2	3	4
4	Badan Pendapatan Daerah	Kepala Badan	6,900,000
		Sekretaris	3,450,000
		Kepala Bidang	2,875,000
		Kepala Seksi/Kasubbag/Kasubbid	1,740,000
		Pelaksana Gol.IV	928,000
		Pelaksana Gol.III	870,000
		Pelaksana Gol.II	696,000
		Pelaksana Gol.I	580,000
		Operator Console PBB-P2	1,392,000
		Bendahara Pengeluaran	1,160,000
		Bendahara Penerimaan	1,160,000
		5	Badan Perencanaan Pembangunan
Sekretaris	4,720,000		
Kepala Bidang	4,181,000		
Kepala Seksi/Kasubbag/Kasubbid	2,210,000		
Pelaksana Gol.IV	944,000		
Pelaksana Gol.III	885,000		
Pelaksana Gol.II	708,000		
Pelaksana Gol.I	590,000		
Bendahara Pengeluaran	1,180,000		
6	Inspektorat	Inspektur	7,200,000
		Sekretaris	3,450,000
		Inspektur Pembantu	3,450,000
		Kepala Seksi/Kasubbag/Kasubbid	1,180,000
		Auditor Utama	2,006,000
		Auditor Madya	1,652,000
		Auditor Muda	1,416,000
		Auditor Pertama	944,000
		Auditor Penyelia	1,180,000
		Auditor Pelaksana Lanjutan	944,000
		Auditor Pelaksana	826,000
		Pelaksana Gol.IV	826,000
		Pelaksana Gol.III	708,000
		Pelaksana Gol.II	590,000
		Pelaksana Gol.I	472,000
		Bendahara Pengeluaran	1,180,000
7	Dinas Pendidikan	Kepala Dinas	5,900,000
		Sekretaris	2,950,000
		Kepala Bidang	2,360,000
		Kepala Seksi/Kasubbag/Kasubbid	1,180,000
		Pelaksana Gol.IV	826,000
		Pelaksana Gol.III	708,000
		Pelaksana Gol.II	590,000
		Pelaksana Gol.I	472,000
		Bendahara Pengeluaran	1,534,000
		Pengawas Sekolah SMP Gol.IV	1,150,000
		Pengawas Sekolah SD Gol. IV	862,500

NO	PERANGKAT DAERAH		JUMLAH PERBULAN
1	2	3	4
	Dinas Pendidikan	Pengawas Sekolah Gol.III	690,000
		Guru Gol.IV Bersertifikasi	630,000
		Guru Gol.IV non Bersertifikasi	575,000
		Guru Gol.III Bersertifikasi	575,000
		Guru Gol.III non Bersertifikasi	517,500
		Guru Gol.II Bersertifikasi	460,000
		Guru Gol.II non Bersertifikasi	345,000
		Kepala Sekolah TK dan SDN Bersertifikasi	690,000
		Kepala Sekolah TK dan SDN non Bersertifikasi	920,000
		Kepala Sekolah SMP Bersertifikasi	862,500
		Kepala Sekolah SMP non Bersertifikasi	1,150,000
		Pelaksana Gol.I pada SD, SMP	354,000
		Pelaksana Gol.II pada SD, SMP	450,000
		Pelaksana Gol.III pada SD, SMP	550,000
		Bendahara Pengeluaran SMP	900,000
		Kepala Tata Usaha SMP	800,000
		8	Dinas Kesehatan
Sekretaris	2,950,000		
Kepala Bidang	2,360,000		
Kepala Seksi/Kasubbag/Kasubbid	1,180,000		
Kepala Puskesmas	1,770,000		
Dokter Puskesmas	2,360,000		
Pelaksana Gol.IV	826,000		
Pelaksana Gol.III	708,000		
Pelaksana Gol.II	590,000		
Pelaksana Gol.I	472,000		
Bendahara Pengeluaran	1,534,000		
Bendahara Penerimaan	708,000		
(catatan : Kepala Puskesmas Pembantu disesuaikan dengan golongan)	-		
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Sekretaris	3,250,000
		Kepala Bidang	2,600,000
		Kepala Seksi/Kasubbag/Kasubbid	1,300,000
		Pelaksana Gol.IV	910,000
		Pelaksana Gol.III	780,000
		Pelaksana Gol.II	650,000
		Pelaksana Gol.I	520,000
		Bendahara Pengeluaran	1,690,000
		Bendahara Penerimaan	1,170,000

NO	PERANGKAT DAERAH		JUMLAH PERBULAN
1	2	3	4
10	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kepala Dinas	7,200,000
		Sekretaris	3,250,000
		Kepala Bidang	2,600,000
		Kepala Seksi/Kasubbag/Kasubbid	1,300,000
		Pelaksana Gol.IV	910,000
		Pelaksana Gol.III	780,000
		Pelaksana Gol.II	650,000
		Pelaksana Gol.I	520,000
		Bendahara Pengeluaran	1,690,000
		Bendahara Penerimaan	1,040,000
11	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas	5,900,000
		Sekretaris	2,875,000
		Kepala Bidang	2,300,000
		Kepala Seksi/Kasubbag/Kasubbid	1,150,000
		Pelaksana Gol.IV	805,000
		Pelaksana Gol.III	690,000
		Pelaksana Gol.II	575,000
		Pelaksana Gol.I	460,000
		Bendahara Pengeluaran	1,150,000
		Bendahara Penerimaan	805,000
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas	5,900,000
		Sekretaris	2,875,000
		Kepala Bidang	2,300,000
		Kepala Seksi/Kasubbag/Kasubbid	1,150,000
		Pelaksana Gol.IV	805,000
		Pelaksana Gol.III	690,000
		Pelaksana Gol.II	575,000
		Pelaksana Gol.I	460,000
		Bendahara Pengeluaran	1,150,000
		Bendahara Penerimaan	805,000
13	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas	5,900,000
		Sekretaris	2,950,000
		Kepala Bidang	2,360,000
		Kepala Seksi/Kasubbag/Kasubbid	1,180,000
		Pelaksana Gol.IV	826,000
		Pelaksana Gol.III	708,000
		Pelaksana Gol.II	590,000
		Pelaksana Gol.I	472,000
		Bendahara Pengeluaran	1,180,000
		Bendahara Penerimaan	600,000
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas	5,900,000
		Sekretaris	2,875,000
		Kepala Bidang	2,300,000
		Kepala Seksi/Kasubbag/Kasubbid	1,150,000
		Pelaksana Gol.IV	805,000
		Pelaksana Gol.III	690,000
		Pelaksana Gol.II	575,000

NO	PERANGKAT DAERAH		JUMLAH PERBULAN
1	2	3	4
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelaksana Gol.I	460,000
		Bendahara Pengeluaran	1,150,000
		Bendahara Penerimaan	920,000
15	Dinas Sosial	Kepala Dinas	5,900,000
		Sekretaris	2,875,000
		Kepala Bidang	2,300,000
		Kepala Seksi/Kasubbag/Kasubbid	1,150,000
		Kepala UPT BLK	1,725,000
		Pelaksana Gol.IV	805,000
		Pelaksana Gol.III	690,000
		Pelaksana Gol.II	575,000
		Pelaksana Gol.I	460,000
		Bendahara Pengeluaran	1,150,000
16	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Kepala Dinas	5,900,000
		Sekretaris	2,875,000
		Kepala Bidang	2,300,000
		Kepala Seksi/Kasubbag/Kasubbid	1,150,000
		Pelaksana Gol.IV	805,000
		Pelaksana Gol.III	690,000
		Pelaksana Gol.II	575,000
		Pelaksana Gol.I	460,000
		Bendahara Pengeluaran	1,150,000
		Bendahara Pengeluaran Pembantu (BLK)	805,000
		Bendahara Penerimaan	805,000
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas	5,900,000
		Sekretaris	2,875,000
		Kepala Bidang	2,300,000
		Kaseksi/Kasubbag/Kasubbid	1,150,000
		Pelaksana Gol.IV	805,000
		Pelaksana Gol.III	690,000
		Pelaksana Gol.II	575,000
		Pelaksana Gol.I	460,000
		Bendahara Pengeluaran	1,150,000
		Bendahara Penerimaan	920,000
18	Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Badan	5,900,000
		Sekretaris	2,875,000
		Kepala Bidang	2,300,000
		Kepala Bidang Diklat merangkap sekretaris KORPRI	2,645,000
		Kaseksi/Kasubbag/Kasubbid	1,150,000
		Pelaksana Gol.IV	805,000
		Pelaksana Gol.III	690,000
		Pelaksana Gol.II	575,000
		Pelaksana Gol.I	460,000
		Bendahara Pengeluaran	1,150,000

NO	PERANGKAT DAERAH		JUMLAH PERBULAN
1	2	3	4
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan	5,900,000
		Sekretaris	2,875,000
		Kepala Bidang	2,300,000
		Kepala Seksi/Kasubbag/Kasubbid	1,150,000
		Pelaksana Gol.IV	805,000
		Pelaksana Gol.III	690,000
		Pelaksana Gol.II	575,000
		Pelaksana Gol.I	460,000
		Bendahara Pengeluaran	1,150,000
		20	Dinas Ketahanan Pangan
Sekretaris	2,875,000		
Kepala Bidang	2,300,000		
Kepala Seksi/Kasubbag/Kasubbid	1,150,000		
Pelaksana Gol.IV	805,000		
Pelaksana Gol.III	690,000		
Pelaksana Gol.II	575,000		
Pelaksana Gol.I	460,000		
Bendahara Pengeluaran	1,150,000		
21	Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa		
		Sekretaris	2,875,000
		Kepala Bidang	2,300,000
		Kepala Seksi/Kasubbag/Kasubbid	1,150,000
		Pelaksana Gol.IV	805,000
		Pelaksana Gol.III	690,000
		Pelaksana Gol.II	575,000
		Pelaksana Gol.I	460,000
		Bendahara Pengeluaran	1,150,000
		22	Dinas Pertanian
Sekretaris	2,950,000		
Kepala Bidang	2,360,000		
Kepala Seksi/Kasubbag/Kasubbid	1,180,000		
Kepala UPT Kebun Raya	1,770,000		
Kepala UPT	1,180,000		
Pelaksana Gol.IV	826,000		
Pelaksana Gol.III	708,000		
Pelaksana Gol.II	590,000		
Pelaksana Gol.I	472,000		
Bendahara Pengeluaran	1,180,000		
Bendahara Pengeluaran Pembantu	1,000,000		
Bendahara Penerimaan	708,000		
23	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		
		Sekretaris	2,875,000
		Kepala Bidang	2,300,000
		Kepala Seksi/Kasubbag/Kasubbid	1,150,000
		Pelaksana Gol.IV	805,000
		Pelaksana Gol.III	690,000

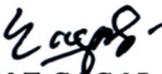
NO	PERANGKAT DAERAH		JUMLAH PERBULAN
1	2	3	4
	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pelaksana Gol.II	575,000
		Pelaksana Gol.I	460,000
		Bendahara Pengeluaran	1,150,000
24	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala Dinas	5,900,000
		Sekretaris	2,875,000
		Kepala Bidang	2,300,000
		Kepala Seksi/Kasubbag/Kasubbid	1,150,000
		Pelaksana Gol.IV	805,000
		Pelaksana Gol.III	690,000
		Pelaksana Gol.II	575,000
		Pelaksana Gol.I	460,000
		Bendahara Pengeluaran	1,150,000
25	Dinas Pariwisata	Kepala Dinas	5,900,000
		Sekretaris	3,000,000
		Kepala Bidang	2,400,000
		Kepala Seksi/Kasubbag/Kasubbid	1,200,000
		Pelaksana Gol.IV	840,000
		Pelaksana Gol.III	720,000
		Pelaksana Gol.II	600,000
		Pelaksana Gol.I	480,000
		Bendahara Pengeluaran	1,200,000
		Bendahara Penerimaan	840,000
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Kepala Dinas	5,900,000
		Sekretaris	2,875,000
		Kepala Bidang	2,300,000
		Kepala Seksi/Kasubbag/Kasubbid	1,150,000
		Pelaksana Gol.IV	805,000
		Pelaksana Gol.III	690,000
		Pelaksana Gol.II	575,000
		Pelaksana Gol.I	460,000
		Bendahara Pengeluaran	1,150,000
27	RSUD Dr Hadrianus Sinaga	Direktur	4,720,000
		Kepala Bagian/ Kepala Bidang	2,360,000
		Kepala Seksi/Kasubbag/Kasubbid	1,180,000
		Dokter Spesialis	22,800,000
		Dokter Umum	2,596,000
		Dokter Gigi	2,596,000
		Kepala Instalasi	826,000
		Petugas Radiologi	826,000
		Petugas Laboratorium	826,000
		Pelaksana Gol.IV	826,000
		Pelaksana Gol.III	708,000
		Pelaksana Gol.II	590,000
		Pelaksana Gol.I	472,000
		Bendahara Pengeluaran	1,180,000
		Bendahara Penerimaan	944,000

NO	PERANGKAT DAERAH		JUMLAH PERBULAN
1	2	3	4
28	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Kantor	4,720,000
		Kepala Seksi/ kasubbag	1,150,000
		Pelaksana Gol.IV	805,000
		Pelaksana Gol.III	690,000
		Pelaksana Gol.II	575,000
		Pelaksana Gol.I	460,000
		Bendahara Pengeluaran	1,000,000
29	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	5,900,000
		Sekretaris	2,875,000
		Kepala Bidang	2,300,000
		Kepala Seksi/Kasubbag/Kasubbid	1,150,000
		Pelaksana Gol.IV	805,000
		Pelaksana Gol.III	690,000
		Pelaksana Gol.II	575,000
		Pelaksana Gol.I	460,000
		Bendahara Pengeluaran	1,140,000
30	Kecamatan	Camat	4,720,000
		Sekretaris Kecamatan	2,300,000
		Lurah	1,380,000
		Sekretaris Kelurahan	1,150,000
		Kepala Seksi/ Kasubbag Kelurahan	862,500
		Kepala Seksi di Kecamatan	1,150,000
		Kasubbag di Kecamatan	862,500
		Pelaksana Gol.IV	690,000
		Pelaksana Gol.III	575,000
		Pelaksana Gol.II	460,000
		Pelaksana Gol.I	402,500
		Bendahara Pengeluaran	1,000,000
		Bendahara Penerimaan	700,000

BUPATI SAMOSIR
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 4 SERI F NOMOR 481